

ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ASTA CITA DI PAPUA BARAT DAYA BERDASARKAN TEORI HAROLD D. LASSWELL

Henraman¹⁾, Alyn Wulandary²⁾, Jofier Geofani Titarsole³⁾, Siti Nursyamsiah Nabi⁴⁾

^{1),2),3),4)} Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

e-mail : maahendraaaa09@gmail.com

Received: 10-11-2024

Revised: 12-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Political Communication, Papua People's Assembly, ASTA CITA Program, Harold D. Lasswell, Communication Strategy*

This study aims to analyze the political communication strategy of the Papua People's Assembly (Majelis Rakyat Papua/MRP) in implementing the ASTA CITA Program using Harold D. Lasswell's communication theory. A qualitative descriptive approach was employed to explore how MRP communicates government policies to indigenous Papuan communities. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving MRP members, local government officials, traditional leaders, religious leaders, women representatives, youth leaders, and community members. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while the findings were interpreted through Lasswell's five communication elements: Who, Says What, In Which Channel, To Whom, and With What Effect. The findings reveal that MRP functions as a credible political communicator by delivering policy messages through public dialogues, customary meetings, interpersonal communication, mass media, and digital platforms. The communication strategy emphasizes culturally sensitive messages that strengthen public understanding of the ASTA CITA Program, enhance policy legitimacy, and encourage community participation. Despite challenges related to geographical conditions and limited communication infrastructure in Papua, the involvement of customary and religious leaders as local communicators significantly improves message acceptance and public trust. The study concludes that the effectiveness of MRP's political communication strategy depends on the integration of communicators, messages, communication channels, target audiences, and communication outcomes within Papua's socio-cultural context. This research contributes to the development of political communication studies by demonstrating the applicability of Lasswell's communication model in analyzing policy communication strategies implemented by representative institutions in multicultural and geographically complex regions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melaksanakan Program ASTA CITA menggunakan teori komunikasi Harold D. Lasswell. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana MRP mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat adat Papua. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi peserta, dan analisis dokumen yang melibatkan anggota MRP, pejabat pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan perempuan, tokoh pemuda, dan anggota masyarakat. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan temuan ditafsirkan melalui lima elemen komunikasi

Kata Kunci: *Political Communication, Papua People's Assembly, ASTA CITA Program, Harold D. Lasswell, Communication Strategy*

Lasswell: Siapa, Mengatakan Apa, Di Saluran Mana, Kepada Siapa, dan Dengan Efek Apa. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa MRP berfungsi sebagai komunikator politik yang kredibel dengan menyampaikan pesan kebijakan melalui dialog publik, pertemuan adat, komunikasi interpersonal, media massa, dan platform digital. Strategi komunikasi menekankan pesan sensitif budaya yang memperkuat pemahaman publik tentang Program ASTA CITA, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Terlepas dari tantangan terkait kondisi geografis dan infrastruktur komunikasi yang terbatas di Papua, keterlibatan tokoh adat dan agama sebagai komunikator lokal secara signifikan meningkatkan penerimaan pesan dan kepercayaan publik. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas strategi komunikasi politik MRP bergantung pada integrasi komunikator, pesan, saluran komunikasi, audiens target, dan hasil komunikasi dalam konteks sosial-budaya Papua. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi komunikasi politik dengan menunjukkan penerapan model komunikasi Lasswell dalam menganalisis strategi komunikasi kebijakan yang diterapkan oleh lembaga perwakilan di daerah yang multikultural dan kompleks secara geografis.

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan salah satu unsur fundamental dalam sistem demokrasi karena menjadi sarana utama bagi aktor politik dalam menyampaikan kebijakan publik, membangun legitimasi pemerintahan, membentuk opini publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi kebijakan tersebut, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan lembaga politik dalam mengelola komunikasi secara efektif sehingga pesan-pesan politik dapat dipahami, diterima, dan memperoleh dukungan dari masyarakat.¹ Dengan demikian, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun hubungan antara negara dan warga negara melalui proses komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan.²

Dalam kajian komunikasi politik, Harold D. Lasswell mengemukakan bahwa komunikasi dapat dianalisis melalui lima unsur utama, yaitu *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*.³ Model ini menjadi salah satu teori klasik yang masih relevan digunakan dalam menganalisis komunikasi politik karena mampu menjelaskan hubungan antara komunikator politik, isi pesan, media yang digunakan, sasaran komunikasi, dan dampak yang dihasilkan dari proses komunikasi tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, teori Lasswell memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi pemerintah

¹ Pugu, M. R., & Manullang, E. V. (2025). *MODEL PENGELOLAAN PERBATASAN LAUT DAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA*. Penerbit Andi.

² Nahari, R. A. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Papua Atas Kesejahteraan Orang Asli Papua Pasca 2021. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5677-5689.

³ Cangara, H. (2007). Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.

maupun lembaga politik dalam membangun legitimasi serta memperoleh dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan.⁴

Program ASTA CITA merupakan agenda strategis pemerintahan yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan implementasi program tersebut memerlukan strategi komunikasi politik yang mampu menghubungkan pemerintah dengan masyarakat secara efektif.⁵ Komunikasi politik menjadi instrumen penting dalam proses penyampaian kebijakan karena implementasi kebijakan publik pada hakikatnya merupakan proses politik yang membutuhkan legitimasi dan dukungan masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan Program ASTA CITA tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh berbagai aktor pemerintahan.⁶

Papua merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik yang sangat kompleks. Keragaman suku, bahasa, adat istiadat, struktur kepemimpinan adat, serta kondisi geografis menyebabkan proses komunikasi kebijakan tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme birokrasi formal. Sebaliknya, strategi komunikasi politik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal agar pesan kebijakan dapat diterima oleh masyarakat secara lebih efektif. Dalam masyarakat yang plural seperti Papua, komunikasi politik berbasis budaya memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik (political trust), memperkuat legitimasi kebijakan, serta menciptakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional.⁷

Dalam konteks tersebut, Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki posisi yang sangat strategis sebagai lembaga representatif kultural Orang Asli Papua yang diberikan kewenangan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat adat sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.⁸ Selain menjalankan fungsi representasi, MRP juga menjalankan fungsi komunikasi politik melalui penyampaian informasi kebijakan, penghimpunan aspirasi masyarakat, fasilitasi dialog publik, serta mediasi antara kepentingan pemerintah dan masyarakat Papua.

⁴ Tohari, A., & Prayogi, B. (2022). Komunikasi politik kelompok radikal pada portal media voaislam. Com dan arrahmah. Com perspektif harold. D lasswell. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(2), 104-112.

⁵ Hapsari, M. M., Rusdiana, C. L., Budiyanto, A., Auladi, F. D., & Mulyono, T. (2026). Estimasi Dampak Program Revitalisasi Sekolah dalam Perspektif Asta Cita. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1 (Spesial Issue)), 2369-2379.

⁶ Mukaddas, J., Syarni, P., Heryanto, R., Yunus, L., Kamarudin, A. P., Bahari, D. I., ... & Indrianti, M. A. (2025). *Asta Cita dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*. Kamiya Jaya Aquatic.

⁷ Sangadji, Z., Febriadi, I., Riskawati, R., Musaad, I., Mangallo, B., Auri, A., ... & Fati, M. (2025). Pemberdayaan Petani Lokal Suku Tehit melalui Edukasi Teknik Penyemaian Benih Tanaman yang Efisien. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 599-605.

⁸ Rengen, Y. (2017). Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus 2017. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 505-519.

Dengan posisi tersebut, MRP tidak hanya berperan sebagai institusi representatif, tetapi juga sebagai komunikator politik yang memiliki legitimasi sosial dan kultural dalam mengomunikasikan Program ASTA CITA kepada masyarakat Papua.⁹

Dalam pelaksanaan Program ASTA CITA, MRP memanfaatkan berbagai saluran komunikasi politik, seperti forum dialog masyarakat, musyawarah adat, konsultasi publik, pertemuan dengan tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, media massa, hingga media digital. Strategi komunikasi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian pesan politik dilakukan melalui pendekatan formal maupun kultural agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Papua. Pendekatan ini sejalan dengan konsep komunikasi politik modern yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima informasi, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam proses komunikasi kebijakan sehingga mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.¹⁰

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas komunikasi pembangunan di Papua dengan menitikberatkan pada komunikasi partisipatif, pemberdayaan masyarakat, serta pendekatan budaya dalam pembangunan daerah. Penelitian lain juga menekankan pentingnya komunikasi lintas budaya dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah di wilayah adat Papu. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis strategi komunikasi politik Majelis Rakyat Papua dalam pelaksanaan Program ASTA CITA menggunakan perspektif teori komunikasi Harold D. Lasswell masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu belum mengkaji secara mendalam bagaimana unsur komunikator (Who), pesan politik (Says What), media komunikasi (In Which Channel), khalayak (To Whom), dan dampak komunikasi (With What Effect) saling berinteraksi dalam membangun legitimasi kebijakan pemerintah di Papua.¹¹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan kebutuhan kajian komunikasi politik kontemporer. Penelitian terdahulu lebih dominan menggunakan perspektif komunikasi pembangunan, sedangkan dimensi komunikasi politik yang menempatkan MRP sebagai aktor komunikasi kebijakan masih belum banyak dikaji. Padahal, sebagai lembaga representatif yang memiliki legitimasi sosial, budaya, dan politik di Papua, MRP memainkan peran strategis dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menganalisis strategi komunikasi

⁹ Meteray, B. (2016). Dinamika Orang Papua Dalam Nieuw Guinea Raad (NGR) 1961 Dan Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005 Di Tanah Papua. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 77-103.

¹⁰ ibid

¹¹ Pahri, P. (2017). *Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui majelis Rakyat Papua: Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

politik Majelis Rakyat Papua berdasarkan teori komunikasi Harold D. Lasswell¹² sehingga mampu menjelaskan secara sistematis hubungan antara aktor politik, pesan kebijakan, media komunikasi, sasaran komunikasi, dan efek komunikasi dalam pelaksanaan Program ASTA CITA.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana strategi komunikasi politik Majelis Rakyat Papua dalam pelaksanaan Program ASTA CITA, bagaimana strategi tersebut dianalisis berdasarkan lima unsur teori komunikasi Harold D. Lasswell, serta bagaimana efektivitas strategi komunikasi politik MRP dalam membangun legitimasi kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program ASTA CITA. Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori komunikasi politik, khususnya dalam kajian komunikasi kebijakan pada masyarakat multikultural, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah dan Majelis Rakyat Papua dalam merumuskan strategi komunikasi politik yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan legitimasi kebijakan publik di Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif¹⁴ untuk menganalisis strategi komunikasi politik Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pelaksanaan Program ASTA CITA. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses komunikasi politik yang dilakukan oleh MRP sebagai lembaga representatif Orang Asli Papua dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan beberapa wilayah pelaksanaan Program ASTA CITA di Papua. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, yang terdiri atas anggota MRP, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen resmi MRP, laporan kegiatan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Pendekatan ini memungkinkan

¹² Chillyness, A. B. (2025). Analisis Komunikasi Publik Dakwah Qotrunnada Syathiry Melalui Media Sosial Di Tiktok Berdasarkan Teori Komunikasi Massa Harold D. Lasswell. *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), 841-854.

¹³ Fajriani, M. D., & Nursholih, S. (2023). Penerapan Model Komunikasi Pemasaran AISAS dan Teori Komunikasi Harold D. Laswell Pada Bobobox Bersama Daniel Mananta. *Demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, dan Periklanan*, 8(2), 191-208.

¹⁴ Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123-136.

peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai strategi komunikasi politik yang diterapkan dalam pelaksanaan Program ASTA CITA.¹⁵

Analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis penelitian didasarkan pada teori komunikasi Harold D. Lasswell (1948) melalui lima unsur komunikasi, yaitu Who, Says What, In Which Channel, To Whom, dan With What Effect, untuk mengidentifikasi aktor komunikasi politik, pesan kebijakan, saluran komunikasi, sasaran komunikasi, serta dampak komunikasi politik dalam pelaksanaan Program ASTA CITA. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas yang tinggi.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pelaksanaan Program ASTA CITA dilaksanakan melalui berbagai bentuk komunikasi yang bertujuan membangun pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, MRP menjalankan perannya sebagai lembaga representatif Orang Asli Papua dengan mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik di Papua. Analisis terhadap temuan penelitian dilakukan menggunakan teori komunikasi Harold D. Lasswell yang meliputi lima unsur, yaitu Who, Says What, In Which Channel, To Whom, dan With What Effect.

1. Who (Komunikator Politik)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) berperan sebagai komunikator politik dalam pelaksanaan Program ASTA CITA. Sebagai lembaga representatif kultural Orang Asli Papua, MRP memiliki legitimasi sosial dan politik untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua. Melalui kewenangan tersebut, MRP tidak hanya menyampaikan informasi mengenai Program ASTA CITA, tetapi juga mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses komunikasi kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anggota MRP secara aktif melakukan sosialisasi

¹⁵ Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123-136.

¹⁶ Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233-243.

melalui dialog publik, kunjungan kerja, dan pertemuan dengan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan pemuda.

Seorang anggota MRP menyatakan:

"Kami tidak hanya menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat Papua menjadi bagian dari pelaksanaan Program ASTA CITA." (Wawancara, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa MRP menjalankan fungsi komunikasi politik sebagai political communicator yang menghubungkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Menurut Lasswell¹⁷ (1948), unsur Who menempatkan komunikator sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan komunikasi melalui kredibilitas dan legitimasi yang dimiliki. Dalam konteks ini, legitimasi kultural MRP memperkuat efektivitas penyampaian kebijakan kepada masyarakat Papua. Temuan ini juga mendukung pendapat McNair (2018) bahwa keberhasilan komunikasi politik dipengaruhi oleh kredibilitas aktor politik dalam membangun kepercayaan publik.

2. Says What (Pesan Politik)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan politik yang disampaikan MRP berfokus pada tujuan Program ASTA CITA, manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua, penguatan kesejahteraan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Penyampaian pesan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat sehingga lebih mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat.

Salah seorang tokoh adat menyampaikan:

"MRP selalu menjelaskan bahwa ASTA CITA bukan hanya program pemerintah pusat, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat Papua untuk memperoleh pembangunan yang lebih baik." (Wawancara, 2025). Pesan politik yang disampaikan tidak bersifat instruktif, melainkan persuasif dengan mengedepankan dialog serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Strategi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Denton dan Woodward (1998) yang menyatakan bahwa pesan politik yang efektif harus mampu membangun pemahaman dan legitimasi terhadap kebijakan publik.¹⁸

3. In Which Channel (Saluran Komunikasi Politik)

¹⁷ Cangara, H. (2007). Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

¹⁸ *ibid*

Penelitian menemukan bahwa MRP memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dalam menyampaikan Program ASTA CITA. Saluran tersebut meliputi forum dialog masyarakat, musyawarah adat, konsultasi publik, media massa lokal, media sosial, serta komunikasi interpersonal melalui tokoh adat dan tokoh agama. Pendekatan komunikasi berbasis budaya masih menjadi media yang paling efektif karena masyarakat Papua lebih mempercayai tokoh adat dibandingkan penyampaian informasi melalui media formal.¹⁹

Seorang tokoh masyarakat menyatakan:

"Kalau informasi disampaikan oleh tokoh adat bersama MRP, masyarakat lebih percaya dibanding hanya membaca informasi dari media." (Wawancara, 2025).

Dalam perspektif Lasswell²⁰, pemilihan saluran komunikasi menentukan efektivitas penyampaian pesan. Penggunaan kombinasi media formal dan komunikasi berbasis budaya menunjukkan bahwa MRP menerapkan strategi komunikasi politik yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat Papua. Temuan ini mendukung pendapat Norris (2000) bahwa efektivitas komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian media komunikasi dengan karakteristik khalayak.²¹

4. To Whom (Khalayak Politik)

Sasaran komunikasi politik²² MRP mencakup masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, serta kelompok-kelompok strategis lainnya. Setiap kelompok memperoleh pendekatan komunikasi yang berbeda sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masing-masing. MRP menggunakan forum khusus perempuan untuk membahas pemberdayaan keluarga, sedangkan komunikasi dengan tokoh adat lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak masyarakat adat dan dukungan terhadap pembangunan daerah.

Strategi segmentasi khalayak tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan informasi setiap kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi Lasswell yang menempatkan analisis khalayak sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan komunikasi politik. McQuail (2010) juga menjelaskan bahwa

¹⁹ Ibid

²⁰ Nurchasanah, A., Zainudin, A., & Habibullah, A. (2026). Analisis Etika Komunikasi Pejabat Publik Berdasarkan Model Komunikasi Harold D. Lasswell. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(5), 832-843.

²¹ Ibid

²² Shahreza, M. (2018). Hakekat, filsafat, dan sejarah komunikasi politik.

pemahaman terhadap karakteristik audiens menjadi dasar dalam penyusunan strategi komunikasi yang efektif.²³

5. With What Effect (Efek Komunikasi Politik)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik MRP memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan Program ASTA CITA. Masyarakat menjadi lebih memahami tujuan program, meningkatnya partisipasi dalam forum-forum konsultasi publik, serta tumbuhnya kepercayaan terhadap MRP sebagai lembaga representatif Orang Asli Papua.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur komunikasi, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau, serta belum meratanya akses internet di beberapa wilayah pedalaman. Untuk mengatasi kondisi tersebut, MRP memaksimalkan komunikasi interpersonal melalui tokoh adat dan tokoh agama sebagai opinion leader di masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik MRP tidak hanya menghasilkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Program ASTA CITA, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah di Papua. Dalam perspektif Lasswell, efek komunikasi tidak hanya diukur dari tersampainya informasi, tetapi juga dari perubahan sikap, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta terbentuknya dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah (Lasswell, 1948).

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik Majelis Rakyat Papua dalam pelaksanaan Program ASTA CITA telah memenuhi lima unsur komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell²⁴, yaitu Who, Says What, In Which Channel, To Whom, dan With What Effect. MRP berperan sebagai komunikator politik yang memiliki legitimasi sosial dan kultural dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat Papua. Kredibilitas kelembagaan tersebut menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Program ASTA CITA. Temuan ini memperkuat pandangan McNair (2018) bahwa efektivitas komunikasi politik sangat dipengaruhi oleh kredibilitas aktor politik sebagai penyampai pesan.

Dari aspek pesan politik, penelitian menemukan bahwa MRP lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pendekatan koersif. Pesan yang disampaikan tidak hanya

²³ Alif, M. I. (2023). Komunikasi Politik: Penyampaian Pesan Dan Pemilihan Media Oleh Bakal Calon Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 8(3), 1-18.

²⁴ Op.cit Cangara, H. (2007). Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.

menjelaskan tujuan Program ASTA CITA²⁵, tetapi juga menghubungkannya dengan kepentingan masyarakat Papua melalui narasi pembangunan yang menghormati nilai-nilai budaya lokal. Strategi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga berfungsi membangun legitimasi kebijakan dan membentuk opini publik. Selain itu, penggunaan forum dialog, musyawarah adat, komunikasi interpersonal, media massa, dan media digital memperlihatkan bahwa MRP menerapkan komunikasi politik yang bersifat multidimensional. Kombinasi berbagai saluran komunikasi tersebut memungkinkan penyebaran pesan yang lebih luas sekaligus meningkatkan efektivitas komunikasi kepada berbagai segmen masyarakat.²⁶

Dari sisi dampak komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik MRP berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program ASTA CITA, memperkuat partisipasi masyarakat dalam berbagai forum komunikasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap MRP sebagai lembaga representatif Orang Asli Papua. Walaupun demikian, hambatan berupa kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur komunikasi, dan akses teknologi informasi yang belum merata masih menjadi tantangan dalam implementasi komunikasi politik di Papua. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat menjadi strategi yang perlu terus dikembangkan agar komunikasi kebijakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa teori Harold D. Lasswell masih sangat relevan dalam menganalisis strategi komunikasi politik lembaga representatif di daerah dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang kompleks seperti Papua. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan kajian komunikasi politik, khususnya mengenai komunikasi kebijakan oleh lembaga representatif daerah dalam mendukung implementasi Program ASTA CITA.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi politik Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pelaksanaan Program ASTA CITA telah dilaksanakan melalui pengelolaan komunikasi yang terencana dengan memanfaatkan fungsi representasi politik dan kultural yang dimiliki MRP. Berdasarkan analisis teori komunikasi Harold D. Lasswell, MRP berperan sebagai komunikator politik (Who) yang memiliki legitimasi dalam menyampaikan pesan politik (Says

²⁵ Putri, N. M. B. W., Dewi, I. A. I. S., Dwiandra, I. D. N. A. O., Wea, C. A. B. P. D., Willem, A., Anjani, I. G. A. A. P., ... & Sinaga, R. A. (2025). *Retorika Asta Cita: Membedah Visi, Menguji Implementasi*. Nilacakra Publishing House.

²⁶ Sinaga, E. S., Tartillah, B. A., Sari, W. K., Sari, D. D., Lestari, N., & Rusniawati, R. (2025). Tranformasi Kearifan Lokal Kelapa (Cocos Nucifera) dan Daun Kelor (Moringa Oleifera) Menjadi Pangan Fungsional Sebagai Bentuk Kemandirian Pangan. *Sipakaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 120-126.

What) mengenai tujuan dan implementasi Program ASTA CITA kepada masyarakat Papua. Penyampaian pesan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi (In Which Channel), seperti dialog publik, musyawarah adat, komunikasi interpersonal, media massa, dan media digital, dengan sasaran beragam kelompok masyarakat (To Whom), meliputi tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, pemerintah daerah, dan masyarakat adat Papua. Strategi komunikasi tersebut menghasilkan efek komunikasi (With What Effect) berupa meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Program ASTA CITA, tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses komunikasi kebijakan, serta meningkatnya legitimasi dan kepercayaan publik terhadap MRP sebagai lembaga representatif Orang Asli Papua.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi politik MRP dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan pendekatan komunikasi formal dengan pendekatan sosial budaya yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Papua. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan infrastruktur komunikasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, dan belum meratanya akses teknologi informasi, pemanfaatan tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat sebagai komunikator lokal terbukti mampu memperkuat penyebaran pesan kebijakan dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap Program ASTA CITA. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat relevansi teori komunikasi Harold D. Lasswell dalam menganalisis komunikasi politik lembaga representatif di tingkat daerah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi MRP dan pemerintah dalam merancang strategi komunikasi politik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis budaya untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Alif, M. I. (2023). Komunikasi Politik: Penyampaian Pesan Dan Pemilihan Media Oleh Bakal Calon Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 8(3), 1-18.
- Cangara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cangara, H. (2007). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chillyness, A. B. (2025). Analisis Komunikasi Publik Dakwah Qotrunnada Syathiry Melalui Media Sosial Di Tiktok Berdasarkan Teori Komunikasi Massa Harold D. Lasswell. *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(2), 841-854.
- Fajriani, M. D., & Nursholih, S. (2023). Penerapan Model Komunikasi Pemasaran AISAS dan Teori Komunikasi Harold D. Laswell Pada Bobobox Bersama Daniel Mananta.

- Demandia: Jurnal Desain Komunikasi Visual, Manajemen Desain, dan Periklanan, 8(2), 191-208.
- Hapsari, M. M., Rusdiana, C. L., Budiyo, A., Auladi, F. D., & Mulyono, T. (2026). Estimasi Dampak Program Revitalisasi Sekolah dalam Perspektif Asta Cita. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1 (Spesial Issue)), 2369-2379.
- Meteray, B. (2016). Dinamika Orang Papua Dalam Nieuw Guinea Raad (NGR) 1961 Dan Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005 Di Tanah Papua. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 77-103.
- Mukaddas, J., Syarni, P., Heryanto, R., Yunus, L., Kamarudin, A. P., Bahari, D. I., ... & Indrianti, M. A. (2025). Asta Cita dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Kamiya Jaya Aquatic*.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123-136.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123-136.
- Nahari, R. A. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Papua Atas Kesejahteraan Orang Asli Papua Pasca 2021. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5677-5689.
- Nurchasanah, A., Zainudin, A., & Habibullah, A. (2026). Analisis Etika Komunikasi Pejabat Publik Berdasarkan Model Komunikasi Harold D. Lasswell. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 4(5), 832-843.
- Pahri, P. (2017). Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui majelis Rakyat Papua: Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Pugu, M. R., & Manullang, E. V. (2025). MODEL PENGELOLAAN PERBATASAN LAUT DAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA. Penerbit Andi.
- Putri, N. M. B. W., Dewi, I. A. I. S., Dwiandra, I. D. N. A. O., Wea, C. A. B. P. D., Willem, A., Anjani, I. G. A. A. P., ... & Sinaga, R. A. (2025). Retorika Asta Cita: Membedah Visi, Menguji Implementasi. Nilacakra Publishing House.

- Rengen, Y. (2017). Kelembagaan Majelis Rakyat Papua Barat (MRP-PB) Dalam Otonomi Khusus 2017. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 505-519.
- Sangadji, Z., Febriadi, I., Riskawati, R., Musaad, I., Mangallo, B., Auri, A., ... & Fati, M. (2025). Pemberdayaan Petani Lokal Suku Tehit melalui Edukasi Teknik Penyemaian Benih Tanaman yang Efisien. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(3), 599-605.
- Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 233-243.
- Shahreza, M. (2018). Hakekat, filsafat, dan sejarah komunikasi politik.
- Sinaga, E. S., Tartillah, B. A., Sari, W. K., Sari, D. D., Lestari, N., & Rusniawati, R. (2025). Tranformasi Kearifan Lokal Kelapa (*Cocos Nucifera*) dan Daun Kelor (*Moringa Oleifera*) Menjadi Pangan Fungsional Sebagai Bentuk Kemandirian Pangan. *Sipakaraya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 120-126.
- Tohari, A., & Prayogi, B. (2022). Komunikasi politik kelompok radikal pada portal media voaislam. Com dan arrahmah. Com perspektif harold. D lasswell. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(2), 104-112.